

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Faktor geologis Indonesia yang rawan bencana menyebabkan persiapan kemitigasian harus diutamakan. Khususnya di daerah rawan bencana atau dekat dengan potensi bencana. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah upaya-upaya mengurangi kerugian bencana. Pengurangan ini dapat diraih melalui pembangunan infrastruktur dan pengkomunikasian pesan mitigasi agar tumbuh perubahan perilaku dalam menghadapi bencana mitigasi bencana. Melalui komunikasi yang baik, mitigasi ini bisa terwujud apabila elemen-elemen stakeholder dapat bersinergi

Desa Situregen di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (luas: 1.020 Ha²; jumlah penduduk: jiwa 4.602 per 14 Maret 2025 sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami karena letaknya di pesisir Samudra Hindia dan dekat dengan zona *megathrust* selatan Jawa, yaitu titik panas seismik yang dapat menimbulkan tsunami yang dahsyat. Zona *megathrust* merupakan istilah yang merujuk pada jalur subduksi lempeng samudera bersubduksi dengan lempeng menciptakan akumulasi energi tektonik yang dapat dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi berkekuatan besar (BPBD DIY, 2024)

Mitigasi bencana, yang melibatkan langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampak bencana, pada dasarnya bergantung pada sistem komunikasi yang efektif agar berhasil. Contoh dari implementasi ini, seperti Kerangka Aksi Hyogo dan Kerangka Kerja Sendai menekankan komunikasi sebagai hal yang penting untuk menumbuhkan kesadaran risiko, mengoordinasikan pemangku

kepentingan, dan mendorong perubahan perilaku, seperti yang terlihat dalam sistem peringatan dini gempa bumi Jepang (Herawati et al. (2023).

Salah satu aspek penting dari pengurangan risiko bencana di tingkat lokal adalah keberadaan komunitas yang tangguh. Menurut *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (2018), keberadaan komunitas ini dibangun atas beberapa faktor berupa kesamaan resiko akan apa yang akan dihadapi. Dari resiko ini komunitas diharuskan melakukan langkah pencegahan, meningkatkan kesiapan, meminimalkan dampak, menangani kondisi darurat, serta memulihkan diri dari tekanan dan guncangan tanpa menghambat keberlanjutan kehidupan dalam jangka panjang. Komunitas yang tangguh bisa ditandai dengan secara sosial kohesif, saling berkesinambungan, mempunyai infrastruktur yang terawat baik, serta mempunyai dan dapat mengatur aset-aset lokal mereka sendiri.

Menurut Marcela dan Usiono (2023), elemen kunci dalam pengelolaan risiko bencana terbagi ke dalam empat tahap operasional. Pertama, fase Pra-Bencana terbagi menjadi dua langkah utama: (1) tindakan antisipatif seperti pencegahan melalui mitigasi struktural (pembangunan infrastruktur tahan bencana) dan non-struktural (kebijakan zonasi wilayah rawan), serta pengurangan risiko melalui identifikasi kerentanan dan penyebaran sistem peringatan dini berbasis teknologi; (2) fase Kesiapsiagaan yang meliputi penyusunan rencana kontinjensi, pelatihan simulasi bencana, pengadaan logistik darurat, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Kedua, Fase Tanggap Darurat, meliputi penanganan krisis saat bencana terjadi, seperti operasi penyelamatan (SAR), distribusi bantuan mendesak, dan manajemen pengungsian. Ketiga, fase pasca bencana, yang fokus pada pemulihan berkelanjutan, mencakup rehabilitasi lingkungan dan sosial, serta rekonstruksi infrastruktur terdampak.

Menurut Seddiky, Giggins, dan Gajendran (2020), pendekatan komunikasi mitigasi bencana berbasis masyarakat sangat penting untuk pengurangan risiko bencana yang efektif karena memprioritaskan pengetahuan lokal, mendorong keterlibatan partisipatif, dan memastikan solusi yang relevan secara budaya.

Menekankan bahwa pendekatan tersebut memberdayakan masyarakat untuk mengambil alih kepemilikan atas upaya membangun ketahanan, mengatasi kerentanan yang khusus yang berhubungan dengan konteks sosial-ekonomi, geografis, dan budaya mereka.

Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) merupakan komunitas yang bergerak dalam bidang mitigasi bencana di Lebak Selatan terkhususnya di level lokal. Penelitian oleh (Supendi et al., 2022,) wilayah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana geologi, khususnya gempa bumi dan tsunami, karena lokasinya yang berdekatan dengan zona *megathrust* selatan Jawa sebuah zona subduksi aktif yang berpotensi menghasilkan gempa bumi berkekuatan besar dan tsunami dahsyat yang mengancam wilayah pesisir selatan Jawa, termasuk Lebak Selatan. Terlebih terhadap potensi gempa tsunami di selatan Jawa, diperlukan kerja kolaboratif seluruh elemen pentahelix dalam upaya preventifnya.

Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) mencanangkan dua program kerja yang diutamakan dalam mitigasi bencana, yaitu *Tsunami Ready Program* dan *Community Resilience Program*. *Tsunami Ready Program* berfokus pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap tsunami melalui 12 indikator Tsunami Ready yang ditetapkan oleh IOC (*Intergovernmental Oceanographic Committee*) UNESCO di wilayah Lebak Selatan (GMLS, 2022).

Kesiapsiagaan tsunami dapat diukur melalui dua belas indikator utama yang mencerminkan kesiapan informasi, sumber daya, serta sistem response. Indikator tersebut meliputi:

- (1) ketersediaan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak tsunami;
- (2) pendataan jumlah penduduk yang berada di zona berisiko;
- (3) identifikasi dan inventarisasi sumber daya penting yang mendukung pengurangan risiko;
- (4) perencanaan jalur serta peta evakuasi tsunami;
- (5) penyediaan media informasi publik mengenai gempa bumi dan tsunami;
- (6) distribusi materi sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat;

- (7) pelaksanaan program pendidikan kesiapsiagaan secara berkelanjutan;
 - (8) penyelenggaraan simulasi tsunami secara berkala;
 - (9) penyusunan rencana operasi kedaruratan khusus tsunami;
 - (10) kesiapan kapasitas operasional dalam merespons keadaan darurat;
 - (11) tersedianya sarana penerimaan informasi gempa dan tsunami selama 24 jam;
- serta
- (12) mekanisme penyebaran peringatan dini yang dapat diakses masyarakat secara terus-menerus.

Sementara *Community Resilience Program* bertujuan memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan pulih dari bencana melalui peningkatan kapasitas. Pelaksanaan program ini cukup aktif, melibatkan berbagai pihak seperti aparat pemerintah desa, komunitas lokal, dan sekolah di sekitar Bayah. Terdapat lima bidang Resiliensi yang hendak dibangun oleh Gugus Mitigasi Lebak yaitu ekonomi, pendidikan, alam, kelembagaan, dan sosial. Pengertian utama dari *Community Resilience Program* meliputi:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengantisipasi risiko, membatasi dampak, dan pulih secara efektif dari bencana
2. Memberdayakan masyarakat lokal sebagai ujung tombak dalam manajemen bencana, bukan hanya sebagai penerima bantuan
3. Mengembangkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat yang efektif
4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan, simulasi, dan edukasi
5. Mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan praktik manajemen bencana modern
6. Membentuk jaringan dan kerjasama antar pemangku kepentingan (pemerintah, NGO, sektor swasta, dan masyarakat)
7. Meningkatkan infrastruktur fisik dan sosial yang mendukung ketahanan terhadap bencana

(GMLS,2022).

Dalam pelaksanaannya, GMLS bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga internasional untuk mengintegrasikan pendekatan ilmiah dan lokal dalam membangun ketahanan masyarakat. GMLS juga menjalankan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, termasuk kampanye mitigasi *megathrust* dan kegiatan edukatif berbasis permainan di berbagai kampung yang tersebar di kecamatan Situregen. Strategi ini menekankan pentingnya komunikasi yang mudah dipahami, inklusif, dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Dalam buku *Introduction to Emergency Management*, Bullock, Haddow, dan Coppola (2020, p. 80) menjelaskan. Telah lama diketahui bahwa ada korelasi yang kuat antara bencana dan kemiskinan. Karena beberapa faktor, termasuk ketidakmampuan untuk membiayai langkah-langkah kesiapsiagaan dan mitigasi. Selain itu, mereka sering kali tinggal di area berisiko tinggi seperti daerah rawan banjir, longsor, atau gempa karena harga lahan atau sewa yang lebih murah di lokasi tersebut. Pengetahuan yang rendah tentang potensi risiko dan cara menghadapinya juga memperburuk kerentanan ini.

Kondisi tersebut sangat terlihat di negara berkembang, yang menyumbang sebagian besar jumlah kematian akibat bencana setiap tahunnya. Namun, ketimpangan risiko berdasarkan status sosial dan ekonomi juga bisa ditemukan di dalam negara itu sendiri termasuk perbedaan kesiapsiagaan antara wilayah kaya dan miskin.

Faktor-faktor risiko seperti kemiskinan dan kondisi sosial juga menyebabkan perbedaan tingkat kerentanan di dalam negara-negara tersebut sendiri terutama di negara-negara berkembang. Di beberapa masyarakat, terdapat kepercayaan agama yang memandang bencana sebagai "kehendak Tuhan". Pandangan seperti ini sering kali tidak mendorong perilaku mitigasi dan kesiapsiagaan yang proaktif, karena bencana dianggap sebagai sesuatu yang tidak

dapat dihindari. Sebaliknya, kepercayaan yang menekankan bahwa manusia baik individu maupun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri dan lingkungan, lebih cenderung menghasilkan tindakan nyata untuk mengurangi risiko bencana. Meskipun mungkin tidak terlihat oleh orang-orang yang mempraktikkan perilaku tersebut, tindakan mitigasi atau persiapan mereka mungkin merupakan hasil dari penyesuaian sosial sebelumnya terhadap suatu bahaya. Dalam implementasi manajemen komunikasi bencana, penting untuk mengidentifikasi momen ketika interaksi sosial justru memperkuat atau melemahkan upaya individu maupun kelompok dalam mengurangi kerentanan terhadap bahaya. Selain itu, perlu juga dipahami proses sosial apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam respons masyarakat terhadap risiko bencana.

Dikarenakan adanya permasalahan masyarakat terkait isu tersebut, maka sebagai komunitas kebencanaan berbasis masyarakat, GMLS memiliki peran penting dalam mengatur serta melaksanakan strategi komunikasi bencana melalui manajemen komunikasi yang terencana. Manajemen komunikasi bencana ini mencakup empat tahapan utama, yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actualizing*, dan *Controlling* (POAC), di mana setiap tahap saling bersinergi untuk menciptakan ritme komunikasi yang teratur, terarah, dan berdampak.

Tahap *Planning* menggambarkan proses perencanaan dan penyusunan *master plan* kegiatan secara matang. Selanjutnya, pada tahap *Organizing*, perencanaan tersebut diuraikan menjadi pembagian tugas yang jelas agar setiap anggota memahami perannya, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan efektif dan terkoordinasi. Pada tahap *Actualizing*, fokus diarahkan pada implementasi program dengan mempertimbangkan kerentanan masyarakat, agar komunikasi yang terbangun benar-benar berangkat dari kebutuhan warga, bukan sekadar instruksi sepihak. Tahap terakhir, yaitu *Controlling*, berfungsi untuk meninjau sejauh mana manajemen komunikasi yang dijalankan telah sesuai dengan visi dan misi awal. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala

serta menjadi dasar perbaikan agar program pada periode berikutnya dapat lebih berdampak dan tidak hanya bersifat seremonial.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan sentral mengenai bagaimana manajemen komunikasi yang diterapkan oleh Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) dapat mengurangi kesenjangan informasi dalam konteks mitigasi bencana alam, khususnya tsunami dan gempa bumi, di Desa Situregen, Kabupaten Lebak.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana implementasi manajemen komunikasi bencana itu diterapkan oleh Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS), khususnya tsunami dan gempa bumi, di Desa Situregen, Kabupaten Lebak.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana manajemen komunikasi diterapkan melalui program-program komunitas

1.5 Kegunaan Penelitian

i. Kegunaan Akademis

Memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan model manajemen komunikasi bencana yang adaptif terhadap kondisi sosial budaya lokal. Penelitian ini juga menambahkan dimensi praktis pada konsep prinsip komunikasi bencana oleh Haddow & Haddow tentang prinsip-prinsip komunikasi darurat (seperti *situational awareness*, *media partnership*, dan *inclusion*), yang diaplikasikan dalam konteks komunitas desa di wilayah rawan bencana.

ii. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) dapat mengurangi kesenjangan informasi mitigasi bencana, serta

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi: Komunitas atau organisasi lokal dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif, kontekstual, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, Lembaga pemerintah dan pemangku kebijakan, seperti BPBD, untuk memperkuat program komunikasi kebencanaan yang lebih partisipatif, perguruan tinggi dan lembaga akademik dalam mengembangkan model pengabdian masyarakat atau KKN yang relevan dengan konteks lokal dan mendukung pembangunan berbasis ketangguhan komunitas dan misi kemanusiaan, mitra kolaborasi lintas sektor, termasuk media, sektor swasta, dan LSM, untuk melihat potensi sinergi dalam membangun ekosistem komunikasi kebencanaan yang inklusif dan berkelanjutan.

i. Kegunaan Sosial

Memperkuat peran masyarakat dalam sistem penanggulangan bencana melalui pendekatan komunikasi yang partisipatif dan berbasis komunitas. Dengan mengkaji strategi komunikasi yang dilakukan oleh Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS), penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kesadaran kolektif, membangun budaya siaga bencana, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, khususnya di wilayah rawan seperti Desa Situregen.

ii. Keterbatasan Penelitian

Temuan penelitian yang bersifat kontekstual di Desa Situregen mungkin tidak sepenuhnya berlaku di daerah lain dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang berbeda. Keterlibatan peneliti yang cukup intens dalam proses pengumpulan data (misalnya, melalui wawancara atau observasi partisipatif) dapat menimbulkan bias subjektif dalam interpretasi data.